



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PROGRAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Yuyun Mulyati ¹, Muhammad Ridwan Caesar ², Ellia Purnama ³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari

*E-mail: mulyati.yuyun@unfari.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: June 10th, 2022
Revised: August 20th, 2022
Accepted: August 28th, 2022
Available online: September 30th, 2022

KEYWORDS

pmks, gepeng, strategic management.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of strategic management in the Social Welfare Problem Management Program of the Social and Poverty Alleviation Service especially against Midfielders and Beggars (Gepeng) in Bandung which reached 80% of the total number of PMKS. The problem is that Gepeng roams the streets of Bandung, especially around Jalan Tegal, with a significant increase in numbers. In 2018 there were 88 Gepeng, in 2019 it increased to 297, this increase had an impact on the safety and comfort of road users and caused social problems. The PMKS program is carried out to overcome and provide guidance to Gepeng by Dinsosnangkis. The research method used is descriptive qualitative with research results that Strategic Management which consists of indicators: Conformance (Consonance) Excellence (Advantage) Consistency (Consistency) Feasibility, the PMKS program has not been implemented properly, it is proven that the PMKS program has been carried out but there are still new sprawl that cause new problems, so that the consistency needs to be overcome. The solution is to provide training and skills according to interests and talents, conduct social guidance and add supporting facilities. The obstacles are the lack of human resources, the low level of awareness and mental attitude of the flattened. In conclusion, the program has not been running as it should, social guidance has been implemented and is aimed at flat people but seems monotonous. It is necessary to modify training and skills programs and add adequate Gepeng shelter facilities.

1. INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi manusia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara termasuk di Indonesia, dampak dari kemiskinan itupun berbeda-beda dan menjadi masalah sosial yang perlu ditangani dengan serius.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



Tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang harus ditanggulangi oleh dinas terkait. Dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan dibentuklah suatu Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017.

Gepeng merupakan bagian dari program ini yang menjadi pusat perhatian pemerintah di kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat pada Pasal 16 ayat (1). Dengan terbitnya PERDA tersebut menekankan bahwa gepeng dilarang keras melakukan kegiatan di jalanan karena dapat mengganggu fasilitas jalan umum, pemandangan bahkan aktivitas pengguna jalan. Gepeng adalah orang yang melakukan kegiatan di jalanan dengan menjadi manusia badut yang berkeliaran di jalanan, seorang wanita dewasa yang membawa anak usia dini dengan baju lusuh, anak-anak jalanan dengan baju lusuh membawa kemoceng dan memintaminta pada pengguna jalan dan lain sebagainya. Aktivitas Gepeng di jalanan tersebut menjadi sumber penghasilan utama atau sebagai profesi bahkan ada yang mengorganisir..

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki wewenang serta bertanggung jawab dalam hal penanganan permasalahan sosial di Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat masalah kurangnya pegawai sehingga kurang efektif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang membutuhkan bimbingan sosial, kurang peduli pada penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis selama dilakukan bimbingan dan rehabilitasi. Fasilitas yang kurang memadai sehingga gelandangan dan pengemis murni (normal badan dan mental) dijadikan satu kamar dengan para gelandangan dan pengemis yang memiliki masalah kejiwaan atau disabilitas.

Dalam menunjang keberhasilan mengatasi permasalahan tersebut, perlu melakukan program manajemen strategi dalam penanganan Gepeng, yang dilaksanakan dengan proses yang dimulai dari perencanaan, implementasi, serta pengendalian satu strategi organisasi, menentukan misi dan tujuan organisasi agar tercapai tujuan, melalui program "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)", yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai fasilitator, harus mampu melakukan serangkaian program untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Bandung. Terdapat beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan Program Manajemen Strategi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Dinsosnangkis Kota Bandung, yaitu :

1. Masih kurangnya konsistensi Program Manajemen Strategi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dengan situasi dan kondisi di jalanan Kota Bandung. Hal ini terlihat dari tabel 1.2

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis

No	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Gelandangan	27	180	110
2	Pengemis	61	117	162
	Total	88	297	272

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, 2021.

Pada Tabel 1.2 memperlihatkan data gelandangan dan pengemis yang terdaftar di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018 berjumlah 88 orang, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 297 orang. .

2. Kurangnya optimalisasi penyesuaian program keterampilan yang diberikan untuk Gepeng dengan minat dan bakatnya. Hal ini terlihat dari setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan, belum adanya perubahan dalam monetisasi bagi Gepeng dalam menghasilkan uang sebagai sumber penghasilan. Hal ini, membuat sebagian besar Gepeng kembali melakukan aktivitas di jalanan.
3. Masih kurang optimalnya pelayanan program bimbingan sosial dalam memberikan peluang Gepeng untuk menyelesaikan permasalahan sosialnya. Kegiatan yang monoton serta tidak ada ketersinambungan program.

Dalam table 1.3 menyajikan jumlah gepeng yang sudah mendapatkan bimbingan dalam periode triwulan selama 2 tahun berturut-turut:

Tabel 2. Data Gelandangan dan Pengemis yang sudah mendapatkan bimbingan (dalam triwulan)

Pelayanan Gelandangan dan Pengemis	Tahun	I	II	III	IV
	2018	-	-	120	-
2019	-	-	120	-	
2020	-	-	-	22	

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, 2021

Pada tahun 2018 triwulan ketiga sebanyak 120 Gepeng sudah mengikuti kegiatan bimbingan sosial. Kemudian pada tahun 2019 triwulan ketiga gepeng yang sudah mendapatkan bimbingan sebanyak 120 orang, akan tetapi pada tahun 2020 di triwulan ke empat hanya sebanyak 22 orang gepeng yang mendapatkan bimbingan. Terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 81%.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



4. Belum optimalnya fungsi bangunan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) sebagai ruangan penampungan bagi para Gepeng.

Tinjauan Manajemen, Strategi dan Manajemen Strategik

Menurut Pfiffner yang dikutip Sukarna (2011: 2) manajemen adalah: *“Management is concerned with the direction of these individuals and functions to achieve ends previously determined”*, manajemen bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Evancevich yang dikutip Isnati & Fajriansyah (2019:2), manajemen adalah adalah, *“Suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil tujuan yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja”*. Janet Marlina (2016), mengartikan bahwa dalam proses manajemen strategis, manajer secara dinamis mencari strategi yang dapat merespon masalah dan tantangan yang ditimbulkan di lingkungan eksternal, sampai pada penerapan strategis melalui proses perumusan strategi, dan implementasinya dan perubahan secara bertahap. (Gavetti & Rivkin, 2007). Menurut Hinterhuber (2004) mendefinisikan strategi sebagai suatu cara yang menggunakan sumber daya dan kemampuan dari suatu organisasi. Boddy (2005) menjelaskan strategi sebagai cara untuk memutuskan usaha yang dilakukan pada sebuah organisasi.

Strategi menurut Chandler yang dikutip Isnati & Fajriansyah (2019: 3): *“Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang”*.

Pengertian manajemen strategi, menurut Wheelen dan Hunger yang dikutip Isnati & Fajriansyah (2019: 3-4) *“Manajemen Strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, yang mana manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategik atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian”*.

Terdapat empat tolak ukur yang digunakan untuk menguji manajemen strategi menurut Rumelt :

1. *Consistency* (Konsistensi): strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
2. *Consonance* (Penyesuaian): strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan penting yang mungkin terjadi.
3. *Advantage* (Manfaat): strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih).
4. *Feasibility* (kelayakan): strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan yang dapat menimbulkan persoalan baru yang tidak terpecahkan. (Isnati & Fajriansyah (2019:126))

Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya adalah Kantor Sosial Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dengan visi terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang adil dan damai.

Program PMKS adalah Program yang dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung yang merupakan salah satu Dinas Daerah wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Dengan fungsi dan tugasnya dalam hal pemenuhan pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan dengan tujuan terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Fungsi dan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial ini dimaksudkan untuk penanganan masalah sosial yang pada umumnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penanganan fakir miskin, orang lanjut usia, anak jalanan, wanita tuna sosial (WTS).

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus yang didukung dengan data dari dinas terkait. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dengan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan yang terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang terletak di Jalan Babakan Karet Belakang Rusunawa Rancacili, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan pula di beberapa titik Gepeng beroperasi, yaitu pada bulan November 2020 - Agustus 2021. Informan ditentukan secara purposive, seperti tercantum dalam table berikut:

Tabel 3. Daftar Informan

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1	Key informan/ Informan utama
2.	Kepala UPT Pusat Kesejahteraan Sosial	1	Key informan/ Informan utama
3.	Pekerja Sosial (PEKSOS)	2	Key informan/ Informan utama
4.	Gepeng	3	Informan Pendukung
5.	Masyarakat Pengguna Jalan	2	Informan Pendukung
6.	Petugas Kecamatan/Wilayah Setempat & Satpol PP	2	Informan Pendukung
Total		11 orang	

Sumber: diolah peneliti, 2021



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



Teknik analisis data yang dilakukan meliputi *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Verifycation*. Kegiatan analisis yang penting adalah pada kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menguji dan memastikan validitas internal yaitu: triangulasi data, member checking, waktu yang lama dan observasi berulang, pemeriksaan oleh sesama peneliti, pola partisipatoris, dan klarifikasi bias peneliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Keabsahan Penelitian dilakukan dengan cara menempuh suatu analisis terhadap masalah yang ada dengan langkah-langkah yang sistematis, sebagai berikut :

1. Triangulasi data
2. *Member checking*
3. Memperpanjang waktu observasi di lapangan
4. Pemeriksaan oleh sesama peneliti (*peer examination*)
5. Pola Partisipatoris yaitu dengan melibatkan informan dalam tahap penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Manajemen strategi merupakan salah satu faktor penting yang harus diterapkan setiap instansi baik pemerintahan maupun swasta. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung merupakan instansi pelaksana pemerintahan, yang melaksanakan perancangan dan melakukan aksi nyata melalui sebuah program manajemen strategi dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Dinsosnangkis harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti *consistency* (konsistensi), *consonance* (penyesuaian), *advantage* (manfaat), dan *feasibility* (kelayakan) sebuah program manajemen strategi untuk meminimalisir kemungkinan gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan.

Program manajemen strategi yang diterapkan di Dinsosnangkis Kota Bandung sudah dinilai baik namun belum cukup efektif dalam penerapannya. Penelitian dan pembahasan berdasarkan alat ukur yang peneliti gunakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. *Consistency* (Konsistensi)

Dinsosnangkis Kota Bandung, selaku pemangku kebijakan dari pemerintah pusat diberi mandat untuk melakukan pelaksanaan serangkaian program untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal penanggulangan gelandangan dan pengemis yang mengganggu pengguna jalan di Kota Bandung. Banyaknya Gepeng berkeliaran di jalan raya untuk mencari uang/nafkah di jalanan yang mengganggu lingkungan dan membahayakan Gepeng itu sendiri juga orang lain, kondisi ini membuat aparat harus melakukan penertiban terhadap para Gepeng, akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami kesulitan. Keadaan yang terjadi adalah



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



semakin bertambahnya jumlah Gepeng yang beroperasi di jalanan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya konsistensi penanggulangan gepeng, terlihat dari jumlah gepeng mengalami naik dan turun selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian bermunculan gepeng baru di Kota Bandung yang ikut menambah daftar panjang penanggulangan Gepeng tersebut.

Petugas Satpol PP sebagai bagian dari aparat pemerintah yang juga melakukan tugas dalam menertibkan para Gepeng yang berkeliaran di jalanan. Gepeng yang sudah ditertibkan kemudian dibawa untuk mendapatkan rehabilitasi. Beberapa Gepeng yang tidak merasa nyaman setelah ditempatkan di tempat rehabilitasi akhirnya mereka kembali menjadi Gepeng. Jumlah Gepeng yang direhabilitasi di Dinsosnangkis Kota Bandung menunjukkan ketidaksesuaian dengan jumlah Gepeng yang di rehabilitasi. Kenyataannya hanya sebagian atau sedikit Gepeng yang mengikuti rehabilitasi. Setelah itu kembali menjadi Gepeng dengan jenis gepeng baru.

2. *Consonance* (Penyesuaian)

Strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan penting yang mungkin terjadi. Manajemen strategi program penanggulangan gelandangan dan pengemis harus mengupayakan tindakan-tindakan yang bersifat menyesuaikan dengan harapan dan keinginan sasaran, mengingatkan para Gepeng yang terbiasa hidup dan mencari nafkah di jalanan.

Pada program penanggulangan gelandangan dan pengemis telah merancang kegiatan untuk meningkatkan keterampilan diri, berupa program pelatihan : membuat sepatu, montir, memasak dan lain sebagainya. Program keterampilan tersebut bertujuan agar para gepeng mampu membangun usahanya sendiri. Namun, kurangnya penyesuaian dengan bakat yang dimiliki oleh gepeng serta tidak adanya monetisasi masih menimbulkan kontradiktif, dimana gepeng lebih memilih kembali ke jalanan. Beberapa Gepeng ingin berhenti melakukan kegiatan di jalanan, akan tetapi hal ini sulit untuk dilaksanakan karena menjadi gepeng merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dinsosnangkis sudah cukup baik dalam memberikan kegiatan terhadap Gepeng agar tidak terus berkeliaran di jalanan, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan namun kurangnya penyesuaian pelatihan dengan minat dan bakat.

3. *Advantage* (Manfaat)

Strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah melalui aktivitas tertentu. Hal ini berkaitan dengan penerapan program penanggulangan gepeng, dimana program tersebut harus memberikan pelayanan yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Pada prakteknya masih ditemukan beberapa indikasi masalah dalam pelayanan bimbingan sosial gepeng. Kegiatan bimbingan sosial yang seharusnya dilaksanakan per-triwulan tidak dilakukan secara berkala, materi pelatihan terkesan monoton membuat kurang menarik minat gepeng.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



Bimbingan sosial yang diberikan itu lebih kepada pemahaman bela negara. Gepeng yang mengikuti program rehabilitasi ini pada dasarnya hanya karena dasar “ikut-ikutan” saja, bukan karena keinginannya untuk berubah lebih baik.

Pelaksanaan program bimbingan sosial yang diberikan kepada Gepeng oleh Dinsosnangkis Kota Bandung sudah cukup baik, namun karena rendahnya tingkat kesadaran atau mental gepeng terhadap bimbingan sosial yang diberikan serta anggaran yang terbatas membuat pelaksanaan program bimbingan sosial tidak bisa dilakukan secara berkala dan terkesan monoton.

4. *Feasibility* (kelayakan)

Strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan di luar kemampuan dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan. Dalam hal ini sebuah manajemen strategi program diharuskan menggunakan sumber yang tidak menghadirkan persoalan baru. Kelayakan sebuah program menjadi entitas nyata dalam mencapai keberhasilan tujuan sebuah organisasi dalam menangani masalah. Kurangnya SDM serta kurang memadainya fasilitas bangunan khusus untuk gepeng, sehingga dalam penampungannya belum dapat dilakukan pengklasifikasian menjadi gepeng murni serta non murni, mereka digabungkan dalam satu kamar yang sama dengan jumlah yang cukup banyak.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia di Dinsosnangkis Kota Bandung Tahun 2020

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	PNS Struktural	23
2.	PNS Non Struktural	25
3.	Pekerja Sosial	21
4.	Perawat	5
Total		54

Sumber: Dinsosnangkis Kota Bandung, 2020

CONCLUSION

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sudah cukup baik, namun masih ditemukan beberapa masalah yang perlu diatasi, hal ini ditandai oleh: (1) Consistency (Konsistensi), yaitu bermunculannya fenomena jenis Gepeng baru, yang menimbulkan masalah kenaikan jumlah Gepeng; (2) Consonance (Penyesuaian). masih terdapat masalah dalam hal penyesuaian pelatihan dengan minat dan bakat dikarenakan program keterampilan sudah diatur dan tidak berdasarkan masukkan dari tersebut. Selain itu, tidak adanya monetisasi (perubahan sesuatu agar dapat menghasilkan uang), sehingga hal ini menjadi alasan gelandangan dan pengemis untuk kembali ke jalanan; (3) Advantage (Manfaat). Dinsosnangkis Kota Bandung sudah melaksanakan dengan baik dalam hal pelaksanaan program bimbingan sosial yang diberikan kepada Gepeng. Namun terkendala dengan rendahnya tingkat kesadaran atau mental Gepeng sehingga bimbingan sosial yang



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



diberikan tidak dapat diikuti dengan baik. Keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program bimbingan sosial belum bisa dilakukan secara berkala dan pemberian materi yang membosankan sehingga menjadi monoton; dan (4) Feasibility (kelayakan). Fasilitas dan bangunan Puskesmas di Dinsosnangkis Kota Bandung sudah cukup baik, Gepeng yang direhabilitasi sudah diklasifikasikan berdasarkan usia dan permasalahan sosialnya. Namun dikarenakan fasilitas yang masih minim berbanding dengan dengan jumlah gepeng yang masuk cukup banyak, maka menimbulkan masalah dalam menempatkan Gepeng murni dan non- murni.

Hambatan dalam mencapai Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinsosnangkis Kota Bandung yaitu sebagai berikut: (1) Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menyebabkan kurang luasnya penjangkauan gelandangan dan pengemis; (2) Kurangnya Fleksibilitas Perencanaan Anggaran Program. (3) Degradasi Mental Gepeng yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam memotivasi diri untuk meningkatnya kesejahteraan hidup dengan usaha yang lebih baik; dan (4). Kompleksitas permasalahan latar belakang gelandangan dan pengemis, dan fasilitas di tempat rehabilitasi yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mencapai Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sebagai berikut: (1) kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat diatasi melalui layanan kedaruratan dan bantuan dari para relawan. (2) Menambah jumlah kuota penerima kegiatan keterampilan dan menambah program lainnya untuk para Gepeng agar meminimalisir rasa bosan dari materi yang diberikan; (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan degradasi mental gelandangan dan pengemis oleh Dinsosnangkis Kota Bandung yaitu dilakukan upaya penjangkauan sosial dengan memberikan himbauan persuasif secara langsung dengan mendatangi lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat gelandangan dan pengemis beraksi; dan (4) Fasilitas yang masih kurang yang menyebabkan ketidaknyamanan gelandangan dan pengemis sebagai penerima manfaat di rumah singgah sementara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu membangun sinergi yang baik dengan dinas atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan gelandangan



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



- dan pengemis, seperti halnya dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Satpol PP, masyarakat, TNI, Polri dsb.
2. Perlu dilakukan kajian perencanaan anggaran sesuai peninjauan kebutuhan program yang dibutuhkan oleh gelandangan dan pengemis, agar meminimalisir kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang sering terjadi.
 3. Perlu ditingkatkan kualitas bimbingan sosial dari segi materi maupun pemateri serta meninjau ulang permasalahan yang dimiliki oleh para Gepeng sangat penting dilakukan, agar setiap program bimbingan sosial dapat bermanfaat dan tepat sasaran.
 4. Perlu adanya peninjauan secara berulang terhadap latar belakang para Gepeng di jalanan.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



REFERENCES

- Anggara, S. (2019). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2013). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gavetti G, Rivkin JW, (2007) On the Origin of Strategy: Action and Cognition over Time. The Institute for Operations Research and the Management Sciences.
- Guire,Mc, (2020) "What if Hurricane Katrina Hit in 2020? The Need for Strategic Management of Disasters." Public Administration Review, suppl. Special Issue on the Future of Public Administration. Washington.
- Indri Dwi Enggar Sari, Setyaningsih Endang Larasati. (2018). Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. ejournal Undip,
- Isnati, Fajriansyah. (2019). Manajemen Strategik: Intisari Konsep dan Teori. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Handayadiningrat, S. (2002). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
- Marlela J.H, Emma Parry (2015) Human resource management, strategic involvement and e-HRM technology. The International Journal of Human Resource Management
- Mehmet, (2021). A Longitudinal Analysis On The Micro-Foundations Of Strategic Management: Where Are Micro Foundations Going?. Business & Management Studies.
- Miles & Huberman, (2014).Qualitative Data Analysis : An expanded source book (2nd ed) : Sage Publications
- Mustafa, B. (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurmayanti, S. (2018). Manajemen Strategi di Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Serang. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Nurwati,N,. (2009) Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan., Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 - 11



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublicia.org/index.php/rp)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



- Pamudji. (2009). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Adminisrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Syafiie, I. K. (2016). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, W. (2012). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Wulandari Asril, Thalita Rifda Khaerani. (2017). *Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*. E-journal Undip, Vol. 6, Nomor 2.